

Bawaslu Pandeglang Luncurkan Pengawasan Pemilu 2024

PANDELGLANG (IM) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang mulai meluncurkan Pengawasan Pemilu 2024 di Aula Gunung Karang, Hotel Horison Altama Pandeglang, Selasa (23/8).

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Pandeglang, Karsono mengatakan, sebelumnya pada tanggal 14 Juli 2022, KPU Pandeglang telah meluncurkan tahapan Pemilu 2024. Maka, dari itu pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi tahapan Pemilu serentak 2024.

“Bawaslu pada hari ini mengadakan launching pengawasan, kami kembali mengajak semua elemen masyarakat sebagaimana dengan slogan Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Maka kami sadar akan banyaknya kekurangan yang kami miliki,” kata Karsono.

Dikatakan Karsono, saat ini pihaknya tengah melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024, terkait pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik. “Bukan

tidak mungkin kita akan melibatkan seluruh elemen masyarakat, saat ini partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024, tengah mengikuti tahapan penyerahan dokumen kepada KPU dan hari ini terdaftar 24 partai politik. Apabila ada masyarakat yang tidak bergabung dengan parpol dan tiba-tiba namanya terdaftar dalam keanggotaan partai politik kami membuka ruang selebar-lebarnya, sebelum ditetapkan menjadi partisipasi partai politik. Maka KPU sudah menyiapkan yang namanya link snggah atau formulir menyanggah atas keterlibatan partai politik,” sambungnya.

Lebih lanjut Karsono menyampaikan bahwa, launching Pengawasan Partisipasi tahapan Pemilu 2024 ini, sebagai wujud nyata keseriusan Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024.

“Kita melibatkan semua elemen masyarakat dan elemen Pemuda, ada juga dari pemerintah daerah dari Kejaksaan dari Kepolisian dan dari TNI dalam rangka mengupayakan agar bagaimana Pemilu 2024 terlaksana dengan baik,” tandasnya. ● pp



IDN/ANTARA

RENCANA ANGKUTAN PUBLIK BUS LISTRIK DI BANDUNG RAYA

Direktur Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Gilarsi W. Setijono (kiri), Direktur Utama PT Jasa Sarana Indrawan Sumantri (tengah) dan Komisaris Utama PT Jasa Sarana Antonius Harso (kanan) berbincang di dalam bus listrik usai kick-off kerja sama antara VKTR dan PT Jasa Sarana, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/8). PT VKTR Teknologi Mobilitas berencana menyediakan bus listrik BYD ukuran medium tipe C6 yang ramah lingkungan sebagai moda angkutan publik dalam mendukung sistem transportasi bus rapid transit (BRT) di wilayah Bandung Raya hingga transportasi pendukung kereta cepat.

Pj Gubernur Al Muktabar: Serapan Anggaran Belanja Provinsi Banten Capai 53%

Al Muktabar juga mengungkapkan perekonomian Provinsi Banten tumbuh di atas rata-rata nasional. Pengangguran dan kemiskinan juga mengalami penurunan hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten juga cukup bagus.

SERANG (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur Al Muktabar mengungkapkan, serapan Belanja pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten saat ini per tanggal 19 Agustus 2022 mencapai 53,83% atau meningkat

sebesar 2,03% dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya yang hanya sebesar 51,80%.

“Artinya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten tergolong cukup baik,” kata Al Muk-

tabar kepada wartawan usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, seperti dikutip dari laman Pemprov Banten, Selasa (23/8).

Terkait ketersediaan anggaran kas di RKUD untuk pembiayaan pembangunan sesuai perencanaan telah sesuai dengan cash flow, tidak terdapat dana idle cash, atas itu Pemprov Banten menjadi salah satu daerah yang tidak mendapat penundaan DAU.

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga mengungkapkan perekonomian Provinsi Banten tumbuh di atas rata-rata nasional. Pengangguran dan

kemiskinan juga mengalami penurunan hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten juga cukup bagus.

Diakuinya, inflasi di Provinsi Banten sedikit di atas dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Jawa. Namun setelah dicermati, lanjut Al Muktabar, inflasi terjadi pada ekonomi produktif. Tiga komponen penyumbang utama inflasi di Provinsi Banten adalah avtur (bahan bakar pesawat), cabe, dan sewa rumah. “Itu menandakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten ada. Artinya daya beli ada, inflasi masih terkendali,” ungkapnya.

Al Muktabar juga menegaskan, pembiayaan Pemilu 2024 bagian dari pembiayaan pembangunan demokrasi di Indonesia “Dana Pemilu adalah pembiayaan untuk pembangunan demokrasi,” jelasnya.

Diungkapkannya, pembentukan dana cadangan Pemilu 2024, untuk memastikan kesiapan Pemprov Banten dalam pembiayaan Pemilu 2024.

Rapat Pimpinan (Rapim) dilaksanakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Sehingga menciptakan hasil maksimal terhadap tata kelola perencanaan dan penganggaran OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. ● yy

Cegah Cacar Monyet, Ini Strategi Dinkes Kabupaten Serang

SERANG (IM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang menyebutkan sampai saat ini belum ada informasi untuk pengadaan vaksin cacar monyet. Namun demikian Dinkes Kabupaten Serang mengungkapkan ada cara efektif untuk mengatasi penyebaran penyakit cacar monyet.

Kepala Dinkes Kabupaten Serang drg Agus Sukmayadi mengatakan untuk vaksin cacar monyet sampai saat ini belum ada informasi. Namun yang terpenting untuk mencegah cacar monyet adalah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes). “Yang terpenting prokes di jalankan dengan ketat, (prokes) masih merupakan upaya yang paling efektif,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/8).

Sebelumnya Agus mengatakan bahwa sampai saat ini belum ditemukan adanya kasus cacar monyet di Kabupaten Serang. Keberadaan cacar monyet bisa diketahui dengan adanya laporan dari masyarakat.

Sebab penyakit tersebut berbeda dari lainnya.

Penyakit tersebut baru bisa diketahui jika sudah dilakukan pengecekan di laboratorium Jakarta. “Harus ada kunjungan ke faskes dari orang yang diduga terpapar, terus dikirimkan sampel usap ke laboratorium di Jakarta,” ucapnya.

Mengingat masih banyak masyarakat yang takut ketika lapor ke faskes kaitan cacar monyet, Dinkes pun sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait penyakit tersebut.

Agar masyarakat dengan sadar mau laporan ketika memiliki gejala serupa cacar monyet. “Sudah dilakukan oleh Kemenkes maupun Dinkes melalui puskesmas,” ujarnya.

Agus mengatakan karena penularan cacar monyet dapat terjadi melalui kontak dengan penderita, maka masyarakat diminta agar menghindari kontak langsung dengan yang diduga dan memiliki ciri ciri terpapar cacar monyet. ● pur

Monitoring Pelaksanaan Program Bebas Denda 2022 di Cikande

SERANG (IM) - Setelah Samsat Serang, Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari, M.Pd. bersama Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Ahmad Budiman, SE, MM juga mengunjungi Samsat Cikande, Senin (22/8), terkait Pembebasan Denda PKB dan Jasa Raharja Cabang Banten telah memberlakukan pembebasan Denda SWDKLLJ Tahun-Tahun Lalu.

Dalam kunjungannya Kepala Bapenda disambut oleh Kasubag TU Opi, Kasi Penerimaan dan Penagihan Wiwi, Kasi Pendataan dan Penetapan Sigit serta Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Cikande Dede Nurul Hadi.

lalu sedangkan denda SWDKLLJ tahun berjalan tetap terkutip,” jelas Dede.

Partisipasi Jasa Raharja Banten merupakan bentuk sinergi bersama Tim Pembina Samsat Provinsi Banten.

Kepala Bapenda Provinsi Banten juga memberikan arahan untuk dimonitor di dalam pelaksanaan pembebasan denda tersebut sesuai Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2022. Diharapkan dengan program bebas denda ini bisa meningkatkan pendapatan dari kendaraan yang menunggak menjadi tertib bayar PKB dan SWDKLLJ.

Tentunya diimbangi dengan meningkatkan pelayanan Samsat agar lebih mudah, murah, cepat, dan nyaman. Selain itu, pelayanan tersebut diharapkan lebih transparan, efektif, efisien, serta dibarengi dengan akuntabilitas yang terjamin. ● pur

Pemkab Lebak Terjunkan Tenaga Pendamping Keluarga untuk Atasi Stunting

LEBAK (IM) - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menerjunkan tim tenaga pendamping keluarga (TPK) untuk mengatasi stunting atau kekerdiln pada anak akibat gagal tumbuh.

“Kita berharap tim TPK sebanyak 1.708 orang terdiri atas bidan, PKK dan petugas KB bekerja keras untuk mendaftarkan anak-anak bawah lima tahun (balita), calon pengantin, ibu hamil dan setelah hamil dengan melaporkan sejujurnya,” kata Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi saat rapat penanganan stunting di Lebak, kemarin.

Dilansir dari Antara, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) bahwa di Kabupaten Lebak tercatat 27 persen anak balita menderita stunting dan terbesar kedua setelah Kabupaten Pandeglang.

Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan stunting untuk menyelamatkan generasi bangsa ke depan. Sebab, generasi stunting itu tentu akan membebani pemerintah jika tidak segera ditangani.

Para penderita stunting akan

berdampak terhadap tingkat kecerdasan dengan pola berpikir lambat, seperti orang idiot. Selain itu juga mereka jika sudah dewasa akan mudah terserang berbagai penyakit, seperti darah tinggi dan diabetes.

Permasalahan itu, kata dia, tentu akan membebani pemerintah, sehingga stunting perlu ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak, termasuk TPK.

Karena itu, petugas TPK dapat melakukan pendataan, penimbangan dan pengukuran balita juga mencatat calon pengantin, ibu hamil serta setelah hamil. “Hasil pendataan itu segera dilaporkan ke petugas tingkat kabupaten untuk ditindaklanjuti jika ditemukan stunting maupun potensi stunting terhadap ibu hamil,” katanya menjelaskan.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2K-BP3A) Kabupaten Lebak Hj Tuti Nurashih di Lebak mengatakan mereka tim TPK itu,

selain melakukan pendataan dan pencatatan terhadap calon pengantin dan ibu hamil juga menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Tim TPK itu nantinya mendampingi keluarga rawan stunting yang tercatat 226.633 kepala keluarga (KK) agar tidak melahirkan stunting. Pendampingan itu khusus keluarga rawan stunting dengan indikator dari pasangan usia subur (PUS) yang memiliki anak banyak, kelahiran jarak dekat, menikah usia muda, tidak memiliki sumber air bersih juga tidak memiliki pendapatan ekonomi dan rumah tak memiliki jamban.

Mereka bertugas sebagai pendamping. Selain memberikan upaya pencegahan stunting juga melaporakan kepada pemerintah daerah. Selain itu melakukan pengawasan kepada anak-anak balita dengan melakukan pengukuran badan, tangan dan lingkar kepala.

“Kami prioritaskan hasil laporan TPK untuk pencegahan stunting dengan melibatkan semua instansi terkait, juga elemen masyarakat hingga tokoh agama,” katanya. ● yan



IDN/ANTARA

KIRAB KEBANGSAAN DI KAKI GUNUNG MERAPI

Peserta membentangkan Bendera Merah Putih sepanjang 165 meter saat Kirab Kebangsaan di Kaki Gunung Merapi, Sukohumi, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (23/8). Selain untuk memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kirab Kebangsaan yang diikuti warga setempat itu juga untuk memperingati Haul Sayid Sholeh Yasin Akbar Bin Yahya yang bertujuan untuk menanamkan kebhinekaan dan kebangsaan bagi generasi muda.

Pemerintah Kota Sorong Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana

SORONG (IM) - Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, pada Selasa (23/8) menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul banjir dan tanah longsor yang melanda bagian wilayahnya.

“Penetapan status tanggap darurat itu diputuskan setelah organisasi perangkat daerah yang dipimpin Plt Sekda menggelar rapat upaya penanggulangan bencana,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong Herlin Sasabone di lansir Antara.

Dia mengatakan bahwa status tanggap darurat bencana ditetapkan berlangsung selama 14 hari dari 23 Agustus sampai 5 September 2022. Pemerintah kota telah membuka posko tanggap darurat penanggulangan bencana di halaman Kantor Wali Kota Sorong.

Selama masa tanggap darurat bencana, BPBD dan organisasi perangkat daerah

yang lain bekerja bersama untuk menangani dampak banjir dan tanah longsor, termasuk mendistribusikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana.

Herlin mengatakan bahwa BPBD juga berkoordinasi dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kepolisian, dan TNI dalam memantau dampak bencana serta mengevakuasi korban bencana.

Menurut data BPBD, tanah longsor telah menyebabkan dua orang meninggal dunia, dua orang terluka, serta dua rumah rusak, dan banjir menyebabkan ribuan rumah warga tergenang di bagian wilayah Kota Sorong.

Pada Selasa sore banjir yang melanda bagian wilayah Kota Sorong sudah mulai surut. Namun, Herlin mengimbau warga Kota Sorong tetap waspada karena curah hujan masih tinggi menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

● dot

Jasa Raharja Banten Gencar Giat DTD ke Pemilik Angkutan Umum di Cilegon

CILEGON (IM) - Petugas Jasa Raharja Samsat Cilegon Nurochman melakukan giat Door to Door (DTD) dengan mengunjungi langsung ke rumah – rumah dari para pemilik angkutan umum (Angkot) yang berada di wilayah Taman Wanasar Indah Kecamatan Citanjil kota Cilegon, Selasa (23/8).

Dalam kegiatan ini, petugas Jasa Raharja mengunjungi beberapa rumah - rumah pemilik angkutan umum untuk mengutip iuran wajib kendaraan umum melalui aplikasi mobile apps JRku dan e-resi, sekaligus menyosialisasikan kepada pemilik kendaraan mengenai program penghapusan denda pajak, BBN 2 dan penghapusan denda tahun lalu SWDKLLJ mulai tanggal 18 Agustus sampai dengan 31 Desember 2022.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Banten Saldhy Putranto menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi PT Jasa Raharja tertulis pada UU Nomor 33/1964

tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang di mana Jasa Raharja menghimpun dana dari masyarakat dengan melakukan pengutipan Iuran Wajib dari penumpung kendaraan angkutan umum.

Saldhy Putranto menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk menjalin hubungan keimanan yang baik dengan pemilik angkutan umum sekaligus upaya meningkatkan pendapatan iuran wajib di sektor UU Nomor 33/1964 dan mendaftarkan kendaraan angkutan umum yang ada di wilayah Cilegon dan Banten pada umumnya.

Adapun besaran iuran wajib diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/ Penyeberangan, Laut, dan Udara. ● yy

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND 2

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND 2 yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "International Media" tertanggal 28 Januari 2022, kami, PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND 2, dengan ini bermaksud menyampaikan pelaksanaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND 2 sebagaimana termaktub dalam addendum REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND 2.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND 2 serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 24 Agustus 2022

Manajer Investasi
REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND 2
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan